

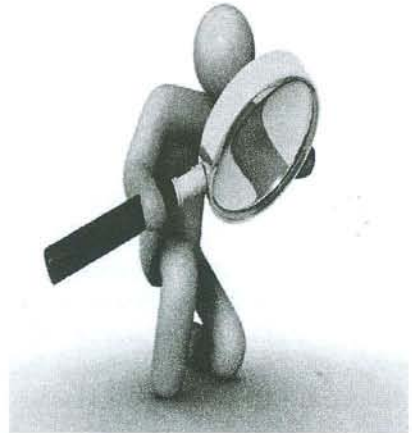
Restropeksi Peran Litbang Lembaga Administrasi Negara Dalam Konteks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan program nasional yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah untuk menopang program pembangunan yang sedang berjalan. Selain sebagai langkah maju untuk memperbaiki kondisi birokrasi di Indonesia, hal ini sekaligus menjadi tantangan bersama, khususnya bagi instansi pemerintah di semua tingkatan, baik di pusat ataupun daerah. Lebih jauh lagi menjadi tantangan bagi Lembaga Administrasi Negara, yang selama ini melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara. Peran strategis itu tentu membutuhkan pemikiran ulang jika kita melihat arah dan perkembangan yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional dan reformasi birokrasi. Pergeseran paradigma dalam pemerintahan tentu harus kita sikapi secara dewasa dengan mendiskusikan beberapa hal yang kiranya relevan dalam melihat kebutuhan dan tantangan ke depan yang dihadapi birokrasi pemerintah.

Dalam konteks pembangunan nasional dan reformasi birokrasi yang saat ini tengah diprogramkan oleh pemerintah, peran litbang Administrasi Negara tentu harus disesuaikan dengan apa yang saat ini menjadi payung kebijakan. Tidak hanya untuk mendukung dari segi konsepsi saja, namun lebih jauh litbang memiliki peran strategis dengan memberi alternatif solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya alternatif solusi semata, unit litbang juga memiliki peran untuk melakukan kritik ataupun auto kritik atas kebijakan yang sudah berjalan. Tentu hal itu harus dilakukan secara proporsional, wajar, dan memiliki tolok ukur yang jelas. Kemampuan teknis, administratif dan pergulatan pemikiran di bidang administrasi negara itulah yang harus menjadi konsen unit litbang di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Sehingga restropeksi peran litbang administrasi negara dalam pembangunan nasional dan reformasi birokrasi memegang peran yang sangat penting sebagaimana disinggung diawal.

Setidaknya ada beberapa tantangan secara internal yang dihadapi oleh unit litbang/kajian saat ini. Persoalan mendasar ini setidaknya menjadi renungan kita bersama dalam konteks restrospeksi peran litbang, diantaranya adalah kemampuan unit litbang dalam menyediakan solusi-solusi atas persoalan yang ada. Apakah solusi yang diberikan dalam perannya sebagai lembaga kajian sudah mampu menjadi *panacea* (obat yang mujarab) untuk mengatasi permasalahan yang ada. Demikian juga dalam menjawab tantangan yang menghadang, khususnya di bidang pemerintahan.

Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah sudut pandang yang digunakan, khususnya dengan memperhatikan kemampuan sisi pengguna dalam menyerap dan mengaplikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh unit litbang di lingkungan LAN. Sehingga pemanfaatan hasil kajian akan mampu mendorong kemampuan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan.



Satu hal yang juga patut dicermati dan menjadi pemikiran bersama adalah penguatan jaringan antara litbang LAN sebagai penyedia hasil kajian dengan pemda yang menjadi mitra kerja. Jejaring merupakan faktor utama untuk mengetahui tingkat relevansi kegiatan riset yang dilakukan unit kajian dengan kebutuhan riil pemangku kepentingan. Jangan sampai riset yang menghabiskan anggaran ratusan juta, kemudian hanya menjadi tumpukan dokumen yang hanya berhenti pada hasil olah pikir intelektual semata tapi miskin aplikasi di lapangan.

Meskipun kita sadari bersama, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pemanfaatan hasil kajian, khususnya *political will* dari masing-masing pengambil kebijakan. Jejaring kerja inilah yang diharapkan mampu menjembatani relevansi kegiatan riset yang dilakukan unit kajian dengan kebutuhan pemerintah dalam mengakselerasi berbagai program kebijakan.

Yang juga harus diingat kembali adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Peneliti. Kapasitas dan kapabilitas ini menjadi faktor kunci yang sangat mempengaruhi hasil-hasil kajian karena kemampuan berpikir dan menganalisis secara kritis terhadap berbagai permasalahan yang ada tergantung pada kemampuan peneliti. Kontekstualitas dalam melihat isu/persoalan dan kreativitas dalam menawarkan solusi merupakan nilai tambah. Tidak hanya dari segi SDM saja, pada aspek ini, unit kajian juga perlu mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan dengan unit kajian yang ada di kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan juga lembaga peneliti independen lainnya.

Akhir kata, semoga hasil-hasil penelitian yang telah dihasilkan mampu merumuskan *policy brief* yang sekiranya berguna untuk membangun pola kajian yang memiliki relevansi dengan kebutuhan pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun daerah. **(Budi Prayitno, S.IP., M.Si)**

Sumber gambar :

http://www.kopertis3.or.id/html/wp_content/uploads/2012/11/penelitian.jpg